

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Chidir, 2014, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Antologi, dalam editor Ahmadi Miru, ____, *Hukum Perdata Materil dan Formil*, USAID, ____.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta.
- Daniri, Mas Achmad, 2014, *Lead by CGC*, Gagas Bisnis, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Harsoyo, Yohanes, *et al.*, 2006, *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta.
- Lowry, John and Alan Dignam, 2003, *Company Law*, LexisNexis Butterworths, UK.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
- Purnomo, Joko, 2016, *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Mili Desa*, Infest, Yogyakarta.
- Putra, Anom Surya, 2015, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.
- Ridho, Ali, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung.
- Saliman, Abdul R., 2017, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Suparji, 2019, *Pedoman Tata Kelola Bumdes*, UAI Press, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

Dewi, Amelia Sri Kusuma, “Peranan Badan Usaha Milik Desa sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”, *Journal of Rural and Development*, Vol. 5, No. 1, Februari 2014.

Dewi, Amelia Sri Kusuma dan Ngesti D. Prasetyo, “Interpretasi Bentuk Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, *Journal Media Hukum*, Vol. 22, No. 2, Oktober 2015.

Hadi, Jusman Khairul, “Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, *Juridica*, Vol. 3 No. 3, November 2021.

Steven Federik, “Pendirian BUMDes dengan Akta Notaris Berbadan Hukum Perkumpulan”, *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 19, No. 1, Juni 2021.

Wardhani, Saskiya Rahma dan Nur Cahyonowati, “Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Karakteristik Corporate Governance Pada Sektor Finansial”, *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 7, No. 2, Mei 2011

Widiastuti, Harjanti, Wahyu Manuhara Putra, Evy Rahman Utami, dan Rudy Suryanto, “Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 22, No. 2, Oktober 2019.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Putra, Anggit Sukma, 2012, *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rachmawati, Ika Nurmalita, 2017, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang Dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tirta Mandiri*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Raodah, Putri, 2018, *Badan Hukum dan Pemisahan Kekayaan Pada Pemodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Saadah, Arina Milya, 2017, *Status Badan Usaha Milik Desa Dalam Akta Pendirian Unit Usaha yang Berbadan Hukum (Studi Kasus di Kabupaten Klaten)*, Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yosephine Sitanggang, 2018, *Urgensi Pengaturan Mengenai Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Desa*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4i, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355)

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316).

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 67).

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 65).

E. Internet

Kementerian Investasi, “UU Cipta Kerja Berikan Jalan Mudah untuk Berinvestasi di Indonesia”, <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia>, diakses 14 Januari 2022.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, “Serap Aspirasi Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja”, <https://uu-ciptakerja.go.id/wp-content/uploads/2020/11/Serap-Aspirasi-Implementasi-Undang-Undang-Cipta-Kerja-Perpajakan.pdf>, diakses 19 Januari 2022.

Dinas PMK Sleman, “Data BUMKAL”, <https://dinpmk.slemankab.go.id/data-bumkal/>, diakses 30 Maret 2022.